



PENETAPAN

Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Petangis, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Petangis, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai 4 (empat) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor XXX1928, tanggal 10 Mei 2010;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama ANAK, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Epic di Desa Petangis, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, tempat kediaman di RT.004, Desa Petangis, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/2005 tanggal 13 Oktober 2005;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di SMPN 2 Batu Engau, Kabupaten Paser dan lulus pada tahun tahun 2018, sebagaimana Ijazah Nomor XXX tanggal 28 Mei 2018;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, Kelurahan tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/2003 tanggal 29 Desember 2003;
1. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan antara ANAK dengan CALON ISTERI dengan alasan anak para Pemohon masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan surat Penolakan Nomor XXX.01/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
2. Bahwa antara anak para Pemohon (ANAK) dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI sudah saling serta menjalin hubungan mengenal 1 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
3. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
4. Bahwa antara anak Pemohon (ANAK) dengan calon istrinya (CALON ISTERI) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
5. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan perempuan manapun, demikian pula halnya dengan calon istri anak para Pemohon;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai PT. Epic di Desa Petangis, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **(ANAK)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **(CALON ISTERI)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak mereka mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, dan trauma psikologis lainnya namun tidak berhasil karena para Pemohon tetap dengan permohonannya karena calon isteri anak para Pemohon tersebut sudah terlanjur hamil;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon menyatakan akan mendampingi

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif dari perkawinan usia muda;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK, telah dihadirkan di persidangan yang dilakukan secara khusus tanpa atribut sidang, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ANAK mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa, ANAK telah mengenal seorang perempuan bernama CALON ISTERI 1 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, ANAK sudah berhubungan badan dengan calon isterinya tersebut dan sekarang calon isterinya tersebut dalam keadaan hamil;
- Bahwa, ANAK bersungguh-sungguh untuk berumah tangga dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa, ANAK sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa, ANAK masih bujang dan tidak pernah menikah dengan orang lain;

Bahwa disamping itu, calon istri anak para Pemohon bernama CALON ISTERI telah dihadirkan di persidangan yang dilakukan secara khusus tanpa atribut sidang, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, CALON ISTERI mengaku saat ini berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa, CALON ISTERI telah berhubungan dengan ANAK selama 1 tahun;
- Bahwa, CALON ISTERI mengaku sudah berhubungan badan dengan ANAK dan sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa CALON ISTERI bersungguh-sungguh ingin menikah dengan ANAK;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, CALON ISTERI sudah terbiasa mengurus rumah tangga membantu orang tua di rumah;
- Bahwa, CALON ISTERI menyatakan masih gadis dan tidak pernah menikah dengan orang lain;

Bahwa hakim telah memeriksa orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon bernama AYAH CALON ISTERI dan IBU CALON ISTERI yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami sebagai orang tua menyetujui ANAK PEMOHON menikah dengan CALON ISTERI;
- Bahwa orang tua ANAK PEMOHON sudah melamar CALON ISTERI untuk menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa orang tua kedua pihak sudah mendaftarkan kehendak nikah anak-anaknya ke KUA, namun ditolak karena ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI masih kurang umur 19 tahun;
- Bahwa pernikahan ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI tidak bisa ditunda lagi karena CALON ISTERI sudah dalam keadaan hamil karena berhubungan badan dengan ANAK PEMOHON;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari KUA Tanah Grogot Nomor XXX/2020 tanggal 27 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 5 Desember 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON dengan Nomor XXX/2005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 13 Oktober 2005,

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 10 Mei 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Ijazah SMP Nomor XXX atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Batu Engau tanggal 28 Mei 2018 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

- Fotokopi Ijazah SMP Nomor XXX atas nama CALON ISTERI, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 8 Tanah Grogot tanggal 28 Mei 2018 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Suliliran Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga dari calon besan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan ponakan saksi bernama CALON ISTERI;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua CALON ISTERI sudah mengurus kehendak nikah ke KUA, namun ditolak KUA karena kedua mempelai belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI sudah berhubungan sejak 1 tahun lalu dan sudah sering pergi berdua;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI segera dinikahkan karena CALON ISTERI sudah hamil karena hubungan badan dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI sama-sama masih bujang, tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON sudah punya pekerjaan, dan CALON ISTERI sudah biasa mengurus rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa orang tua CALON ISTERI juga mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga dari calon besan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan ponakan saksi bernama CALON ISTERI;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua CALON ISTERI sudah mengurus kehendak nikah ke KUA, namun ditolak KUA karena kedua mempelai belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI sudah berhubungan sejak 1 tahun lalu dan sudah sering pergi berdua;
- Bahwa saksi tahu ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI segera dinikahkan karena CALON ISTERI sudah hamil karena hubungan badan dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI sama-sama masih bujang, tidak pernah menikah dengan orang lain;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON sudah punya pekerjaan, dan CALON ISTERI sudah biasa mengurus rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa orang tua CALON ISTERI juga mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Paser (bukti P2 dan P4) yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka secara relatif perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai pria dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 1 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI, umur 17 tahun 7 bulan, karena keduanya sudah saling kenal 1 tahun lamanya, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena calon isterinya tersebut sudah dalam keadaan hamil dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser berdasarkan surat Nomor XXX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 (bukti P1) menolak dengan alasan anak para Pemohon dan calon isterinya masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orangtua calon isteri anak para Pemohon, perihal resiko-resiko kawin muda, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orangtua calon isteri anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tetap ingin segera dilangsungkan, karena disetujui oleh keluarga kedua pihak, antara calon isteri dan calon isteri tidak ada paksaan, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orangtua calon isteri anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon isterinya karena kebutuhan mendesak yaitu calon isteri anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil, dan pernikahan dimaksud sudah disetujui oleh keluarga kedua pihak;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, perempuan yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon isterinya, calon isterinya dalam keadaan hamil lebih 6 bulan akibat berhubungan badan dengan calon anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, dari permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, hakim menyimpulkan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagai batas minimal umur yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk diterima sebagai bukti dalam perkara ini sebagaimana Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 2 RBG jo Pasal 1910 ayat 2 KUHPerdara, keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan di persidangan dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil. Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 RBG jo Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat dipakai untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orangtua calon isteri anak para Pemohon, dan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua dari ANAK PEMOHON dan orang tua dari CALON ISTERI sudah sama-sama menyetujui perkawinan ANAK PEMOHON dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan orang tua dari CALON ISTERI sudah mengurus kehendak perkawinan ke KUA namun ditolak karena CALON ISTERI dan ANAK PEMOHON kurang umur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON, saat ini berumur 18 tahun 1 bulan dan calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTERI, berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa CALON ISTERI dan ANAK PEMOHON menyatakan bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga;
- Bahwa CALON ISTERI dalam keadaan hamil lebih 6 bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa CALON ISTERI sudah terbiasa mengurus urusan rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa antara CALON ISTERI dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram atau halangan perkawinan;
- Bahwa orang tua CALON ISTERI juga mengurus permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat difahami bahwa satu-satunya halangan nikah bagi ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI adalah karena keduanya kurang umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa ada kepentingan mendesak untuk melangsungkan perkawinan anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI karena calon isterinya tersebut sudah hamil lebih 6 bulan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI di persidangan sudah menyatakan kesungguhan dan kesiapannya untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sudah saling mengenal dan saling mencintai karena sudah menjalin hubungan selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim menilai menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI tersebut akan memberikan akibat yang lebih maslahat bagi anak Pemohon tersebut dan calon isterinya terutama bayi yang dikandungnya daripada membiarkannya dalam keadaan hamil dan melahirkan anak di luar perkawinan yang sangat tercela dalam pandangan masyarakat, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan anak yang sedang dalam kandungan tersebut karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih terlepas dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh ibu bapaknya, dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melakukan perkawinan dengan calon isterinya maka anak yang sedang dalam kandungan tersebut mempunyai status yang jelas secara hukum perihal siapa ibu bapaknya, hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat 1 jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama dan sunnah rasul yang diperintahkan dalam Alquran dan Hadits Nabi Saw, sebagai berikut;
Al-Quran surat An-Nuur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...";

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

**يَا مَعْشَرَ النَّبِّاتِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat kekurangan syarat umur bagi anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI dapat ditoleransi dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **CALON ISTERI**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 9 NOVEMBER 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 RABIUL AWAL 1442 Hijriah oleh Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, didampingi Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)